

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar sebagai pedoman Republik Indonesia memiliki tujuan dalam pembukaannya, dan dari keempat tujuan Negara Republik Indonesia terlihat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi suatu usaha yang kini masih terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas generasi penerusnya. Untuk menciptakan generasi yang tangguh maka sudah saatnya pembangunan tidak hanya berorientasi kepada hal-hal fisik saja. Melainkan kepada pembangunan manusia sebagai faktor inti penggerak pembangunan. Pembangunan manusia di Indonesia menggunakan tolak ukur khusus yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini merupakan ukuran yang menggabungkan ukuran tingkat pendapatan, usia harapan hidup, dan pendidikan terakhir. Informasi yang sangat detail mengenai pembangunan manusia hingga tingkat kabupaten atau kota ini akan sangat berguna bagi para pejabat pemerintah di daerah karena dengan adanya desentralisasi, merekalah yang akan mengemban tanggung jawab bagi kemajuan daerahnya.

Pergeseran paradigma pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia menjadi suatu perubahan yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan arus globalisasi dengan generasi penerus yang tangguh. Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian peran atau tugas, dan perilaku yang berkaitan

dengan pemilihan, perolehan dan pematapan karir. Institusi sosial yang kedua, berupa pendidikan dengan fungsi gandanya, yaitu sebagai media pelestarian budaya sekaligus media terjadinya perubahan sosial.

Sementara itu, hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara langsung dapat dijelaskan dari kerangka hasil pendidikan kejuruan. Di samping itu, hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang kerja lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi tersebut dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin maju, oleh karena itu lulusan SMK harus terampil dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemerintah mendorong mencari pemecahan masalah tersebut, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan mengembangkan dan melaksanakan pendekatan pendidikan dengan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan yaitu melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997.

Kebijakan ini menuntut kedua belah pihak yaitu sekolah dan industri secara bersama menyusun konsep, hal ini dimaksudkan agar ada kesesuaian antara sekolah dan industri. Kesesuaian yang dimaksud adalah agar kompetensi yang didapat oleh siswa disekolah merupakan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Industri juga harus berperan aktif dalam menyampaikan kemajuan

teknologi ke pihak sekolah agar terjadi sinkronisasi antara dunia industri dengan dunia pendidikan.

Industri harus berperan untuk berpartisipasi karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja, dan khususnya dari siswa sekolah menengah kejuruan. Kebijakan pendidikan sistem ganda dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan Program Praktek Kerja Industri (Prakerin).

Penerapan kebijakan praktek kerja industri tersebut menggambarkan perubahan mendasar dari model penyelenggaraan pendidikan sebelumnya yaitu (*schooling system*) ke arah sistem ganda (*dual responsibility*), dimana perusahaan atau institusi kerja lainnya menjadi institusi pasangan (IP) dari SMK. Dalam pelaksanaannya institusi pasangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Pelaksanaan praktek kerja industri merupakan upaya sekolah agar mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal dalam memenuhi dinamisasi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak hubungan industri dan observasi awal penulis, program praktek kerja industri SMK N 7 Baleendah kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

- (1) Perencanaan program Prakerin yang seharusnya disusun bersama-sama antara pihak sekolah dan industri tidak berjalan semestinya dan pada kenyataannya hanya dilaksanakan sepihak oleh sekolah tanpa campur tangan industri.
- (2) Pada pelaksanaan Prakerin siswa ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi atau bidang keahlian yang dimiliki.

- (3) Monitoring yang dilakukan oleh guru pembimbing hanya sebatas memeriksa kehadiran siswa di industri.
- (4) Setelah melaksanakan Prakerin tidak semua kompetensi yang diharapkan tercapai.
- (5) Keberadaan institusi pasangan hanya sebatas menjadi tempat praktek siswa untuk melaksanakan prakerin, dan tidak ada keberlangsungan kerja sama dari pihak sekolah.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti program praktek kerja industri pada SMK N 7 Baleendah. Oleh karena itu penulis mengambil judul : **"STUDI EVALUASI PROGRAM PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) DI SMK NEGERI 7 BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG"**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian evaluasi program praktek kerja industri ini, peneliti merumuskan masalah penelitian " Bagaimana pelaksanaan program praktek kerja industri di SMK N 7 Baleendah?"

Untuk lebih jelasnya perumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program praktek kerja industri yang disiapkan oleh SMK N 7 Baleendah ?
2. Bagaimana pelaksanaan program praktek kerja industri SMK N 7 Baleendah?
3. Bagaimana evaluasi dari program praktek kerja industri SMK N 7 Baleendah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan program praktek kerja industri di SMK N 7 Baleendah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program praktek kerja industri di SMK N 7 Baleendah.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari program praktek kerja industri di SMK N 7 Baleendah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk peneliti di lapangan serta hal-hal yang sedang terjadi pada masa kini dan masalah itu memerlukan analisis serta pemecahan masalah. Menurut Suharsimi Arikunto (1990:309) pengertian penelitian deksriptif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala sesuai kenyataan pada saat penelitian dilakukan. Instrumen yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari bagian atau tahapan dari sebuah program yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta teknik angket.

E. Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian adalah SMKN 7 Baleendah yang terdiri dari dua program studi yaitu Teknik Mekanika Otomotif (TMO) dan Teknik Elektronika (Audio Video). Sampel penelitian adalah siswa tingkat tiga program studi Teknik Mekanika Otomotif (TMO) yang telah melaksanakan praktek kerja industri (Prakerin). Jumlah siswa yang melakukan prakerin sebanyak 61 orang.

